



**BAPPEDA
LITBANG**

KABUPATEN BOGOR

LAPORAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2025

Triwulan IV



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas berkat perkenan-NYA, Laporan penyusunan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat disusun.

Melalui Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dalam pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.

Akhirnya melalui Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan IV. Tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran yang akan datang.

Demikian laporan ini disusun sebagai bahan lebih lanjut, terimakasih.

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR



Dr. Bambang Setia Aji, ST., MBA
Pembina Tk. I
NIP. 19730501200501 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Lembar Laporan Pertanggungjawaban.....	iii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
Bab II. Gambaran Umum	
2.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	4
2.2 Susunan Organisasi	5
2.3 Sumber Daya Bappedalitbang.....	6
Bab III. Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
3.1 Perencanaan Kinerja	10
3.2 Capaian Indikator Utaman Bappedalitbang 2025.....	10
3.3 Pelaksanaan Program dan Kegiatan	11
Bab IV. Penutup	
Lampiran	
• Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan IV	

LEMBAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titi Sugiarti, S.T.
NIP : 19760801 200212 2 004
Jabatan : Sekretaris

Dengan ini menyampaikan dokumen laporan hasil kegiatan sebagai salah satu pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan penggunaan anggaran tahun 2025.

Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Outcome	: Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Output	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PPTK	: Masroh, S.E.

Demikian disampaikan sebagai bahan keputusan lebih lanjut.

Cibinong, Desember 2025

Menerima/Mengetahui,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah



Dr. Bambam Setia Aji, S.T., M.B.A.
Pembina Tk. I
NIP. 197305012005011009

Yang menyerahkan,
Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah



Titi Sugiarti, S.T.
Pembina
NIP. 197608012002122004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi terhadap Rencana Kerja ini merupakan bentuk untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rencana kerja tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara triwulanan dan laporan ini merupakan laporan Triwulan IV pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025.

Evaluasi formatif dilakukan pada waktu program/kegiatan berjalan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada saat program/kegiatan sudah berakhir, dengan tujuan untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran/pengalaman yang berguna. Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan evaluasi ini maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024 tentang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Bogor Tahun 2025;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025 adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Organisasi, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Bogor sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan laporan evaluasi renja triwulan IV adalah:

1. Mengukur capaian kinerja utama Perangkat Daerah;
2. Mengukur capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Mengetahui tingkat realisasi anggaran;
4. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan;
5. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Uraian ini tercantum dalam Peraturan Bupati Bogor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

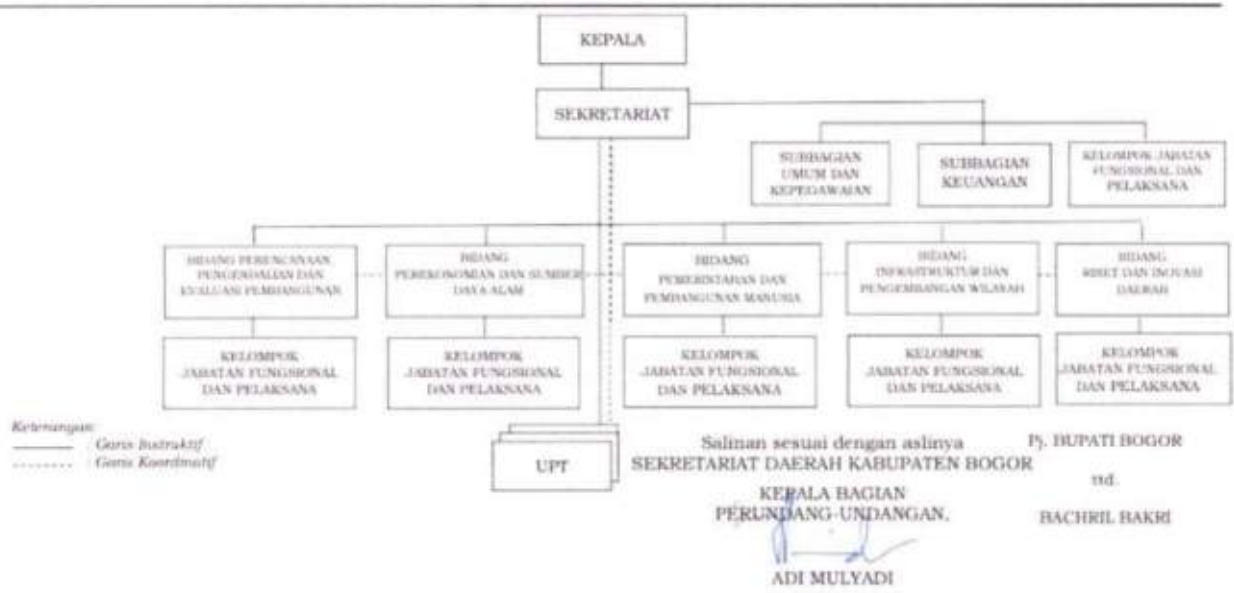
- (1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- (2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- (3) Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- (4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah;
- (5) Pelaksanaan administrasi Badan;
- (6) Pelaksanaan reformasi Birokrasi: dan
- (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.2 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat, membawahkan :
 - (a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (b) Sub Bagian Keuangan;
 - (c) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - (d) Pelaksana
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan :
 - (a) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (b) Pelaksana
- (4) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - (a) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (b) Pelaksana
- (5) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan :
 - (a) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (b) Pelaksana
- (6) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 - (a) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (b) Pelaksana
- (7) Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan:
 - (a) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - (b) Pelaksana

Secara lengkap susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :



2.3 SUMBER DAYA BAPPEDALITBANG

1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah personil ASN/Non ASN pada Bappedalitbang kondisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 137 orang, yang terdiri dari 9 orang Pejabat Struktural, 31 orang Pejabat Fungsional, 34 orang pelaksana, 12 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 46 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, 3 orang tenaga rekrutmen, 1 orang tenaga kebersihan, dan 1 orang tenaga keamanan. Untuk selengkapnya dapat dilihat Tabel berikut:

JUMLAH PEGAWAI BAPPEDALITBANG

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pejabat Struktural	9
2	Pejabat Fungsional	31
3	Pelaksana	34
4	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	12
5	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu	46
6	Tenaga Rekrutmen	3
7	Tenaga Kebersihan	1
8	Tenaga Keamanan	1
	Jumlah	137

2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Bilamana dilihat dari golongan/pangkat dari 86 pegawai yang ada, golongan IV/a sebanyak 18 orang, golongan IV/b sebanyak 2 orang, golongan III/d sebanyak 20 orang, golongan III/c sebanyak 6 orang, golongan III/b sebanyak 15 orang, golongan III/a sebanyak 9 orang, golongan II/d sebanyak 1 orang, golongan II/c sebanyak 3 orang, golongan IX sebanyak 9 orang dan golongan V sebanyak 3 orang,. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**JUMLAH PEGAWAI BAPPEDALITBANG
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG**

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	IV/a	18
2	IV/b	1
3	IV/c	-
4	III/a	8
5	III/b	13
6	III/c	7
7	III/d	20
8	II/c	4
9	II/d	1
10	IX	9
11	V	3
	Jumlah	86

3. Jumlah ASN Berdasarkan Keahlian dan Keterampilan

Apabila dilihat berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu pegawai Bappedalitbang yang ada, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda ada 11, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Pertama ada 9 orang, Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Muda ada 3 orang, Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Pertama ada 2 orang, Pejabat Fungsional Peneliti Ahli Madya ada 1 orang, Pejabat Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama ada 1 orang, Pejabat Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli

Muda ada 2 orang, Pejabat Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Madya ada 1 orang, Pejabat Fungsional Pranata Komputer ada 1 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**JUMLAH PEGAWAI BAPPEDALITBANG
BERDASARKAN JABATAN**

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Perencana Ahli Muda	11
2	Perencana Ahli Pertama	11
3	Peneliti Ahli Madya	1
4	Peneliti Ahli Muda	3
5	Peneliti Ahli Pertama	2
6	Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Madya	1
7	Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Muda	2
8	Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama	1
9	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
10	Pranata Komputer Terampil	1
11	Analis Kebijakan Ahli Pertama	2
12	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
	Jumlah	37

4. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Bappedalitbang yang ada, maka status pendidikan dengan Strata 3 (S3) sebanyak 1 orang Strata 2 (S2) sebanyak 32 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 43 orang, Diploma IV sebanyak 1 orang, Diploma III sebanyak 2 orang dan SLTA/SMK sebanyak 8 orang. Selengkapnya dapat dilihat Tabel dibawah ini :

JUMLAH PEGAWAI BAPPEDALITBANG BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMA	8
2	D-III	2
3	D-IV	1
4	S1	44
5	S2	31
6	S3	1
TOTAL		87

BAB III
TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN
IKU, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 PERENCANAAN KINERJA

Dalam dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, merumuskan dan menetapkan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor untuk periode Tahun 2025-2030, yaitu menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu :

1. "Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)"
2. "Indeks Riset dan Inovasi"

dengan sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. "Nilai Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah",
2. "Persentase Hasil Riset dan Inovasi yang menjadi dasar Kebijakan Daerah".

Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Tahun 2025 yang terdapat pada dokumen Renstra Tahun 2025-2030 tersebut di atas dimana Tingkat Capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan IV 100% atau SANGAT TINGGI.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR UTAMA (IKU) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDALITBANG) KABUPATEN BOGOR.

1. Indikator Tujuan :

- 1) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), dari target Predikat "**BAIK**", sampai Triwulan IV realisasinya **BAIK** dengan tingkat capaian 101,14% .
- 2) Indeks Riset dan Inovasi Daerah, dari target Predikat "**SANGAT BAIK**", sampai Triwulan IV realisasinya **SANGAT BAIK** dengan tingkat capaian 100%.

2. Indikator Sasaran :

- 1) Nilai Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dari target Nilai 88,00 Point sampai Triwulan IV realisasinya 89,00 dengan tingkat capaian 101,14%.
- 2) Persentase hasil riset dan inovasi yang menjadi dasar Kebijakan Daerah, dari target sebesar 53,85 Persen, sampai Triwulan IV realisasinya 53,85 dengan tingkat capaian 100%.

3.3 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan RENJA 2025	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan RENSTRA 2025-2030
1	2
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan RENJA 2025	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan RENSTRA 2025-2030
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan
Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset
	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan pengkajian, dan penerapan
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan
	Bimbingan Teknis dan supervise di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah

Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan RENJA 2025	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan RENSTRA 2025-2030
Invensi dan Inovasi	Invensi dan Inovasi
Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi
Fasilitasi dan Pembinaan untuk penguatan Kerjasama Internasional	Fasilitasi dan Pembinaan untuk penguatan Kerjasama Internasional
Fasilitasi dan Pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Fasilitasi dan Pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Difusi Inovasi	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Difusi Inovasi
Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah"	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah"
Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Praktik baik kepada Pelaku kepada Pelaku Inovasi dan Desiminasi Hasil Riset dan Inovasi kepada Pelaku Inovasi	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Praktik baik kepada Pelaku kepada Pelaku Inovasi dan Desiminasi Hasil Riset dan Inovasi kepada Pelaku Inovasi
Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan RENJA 2025	Uraian Prog/Keg/Sub Kegiatan RENSTRA 2025-2030
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Berdasarkan jumlah Program dan Kegiatan dalam Renja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025-2030 tersebut di atas, terdapat jumlah yang berbeda, dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2024-2026 terdapat 4 (empat) Program, 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 96 (sembilan puluh enam) Sub Kegiatan dan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025 terdapat 4 (empat) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 92 (sembilan puluh dua) Sub Kegiatan.

Dari 4 Program dan 17 kegiatan dan 92 Sub Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dapat digambarkan pelaksanaan masing-masing program/kegiatan, antara lain:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 25.147.739.111,00 (96,23%) dari total anggaran Rp. 26.081.550.523,00, dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 444.424.980,00 (96,23%) dari total anggaran Rp. 461,838,682,00 dan realisasi fisik 100,00%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 157.666.704,00 (95,42%) dari total anggaran Rp. 165.226.412,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 21.111.201,00 (93,13%) dari total anggaran Rp. 22.669.531,00 dengan realisasi fisik 100,00%
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 13.579.740,00 (92,81%) dari total anggaran Rp.14.631.299,00 dengan realisasi fisik 100,00%
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.363.400,00 (91,81%) dari total anggaran Rp. 15.660.047,00 dengan realisasi fisik 100,00%.
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 10.899.090,00 (91,47%) dari total anggaran Rp. 11.914.907,00 dengan realisasi fisik 100,00%
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 21.125.865,00 (93,22%) dari total anggaran Rp. 22.662.034,00 dengan realisasi fisik 100,00%
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi Kinerja SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini

- sebesar Rp. 198.626.040,00 (98,63%) dari total anggaran Rp. 201.380.927,00 dengan realisasi fisik 100,00%
8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.052.940,00 (98,67%) dari total anggaran Rp. 7.693.525,00 dengan realisasi fisik 100,00%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini sebesar Rp. 17.081.756.803,00 (98,67%) dari total anggaran Rp. 17.311.662.855,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 16.836.953.033,00 (98,74%) dari total anggaran Rp. 17.052.178.583,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.126.700.880,00 (94,68%) dari total anggaran Rp. 133.826.236,00 dengan realisasi fisik 100,00%
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.14.073.690,00 (79,19%) dari total anggaran Rp.15.550.462,00 dengan realisasi fisik 100,00%
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.360.200,00 (89,05%) dari total anggaran Rp.16.126.276,00 dengan realisasi fisik 100,00%
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Realisasi Kinerja SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 89.669.000,00 (95,41%) dari total anggaran Rp. 93.981.298,00 dengan realisasi fisik 95,41%

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar ini Rp. 29.060.980,00 (89,88%) dari total anggaran Rp. 32.332.332,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.307.980,00 (88,58%) dari total anggaran Rp. 12.766.444,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.279.250,00 (92,85%) dari total anggaran Rp.6.326.500,00 dengan realisasi fisik 100,00%
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.473.261,00 (89,61%) dari total anggaran Rp. 12.802.907,00 dengan realisasi fisik 100,00%

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar ini Rp. 461.002.870,00 (95,52%) dari total anggaran Rp. 482,609.047,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.275.380,00 (88,61%) dari total anggaran Rp.17.238.996,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 28.041.850,00 (94,96%) dari total anggaran Rp. 29.529.332,00 dengan realisasi fisik 100,00%
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.137.664.650,00 (92,06%) dari total anggaran Rp.149.540.305,00 dengan realisasi fisik 100,00%
4. Sosialisasi Peraturan Perundang Perundangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.104.278.200,00 (97,53%) dari total anggaran Rp.106.922.070,00 dengan realisasi fisik 100,00%

5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.127.095.200,00 (99,59%) dari total anggaran Rp.127.622.483,00 dengan realisasi fisik 100,00%
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana disiplin Pegawai Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.26.872.000,00 (95,49%) dari total anggaran Rp.28.142.553,00 dengan realisasi fisik 100,00%
7. Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.21.721.590,00 (92,20%) dari total anggaran Rp.23.558.363,00 dengan realisasi fisik 100,00%
8. Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.54.000 (98,28%) dari total anggaran Rp.54.945,00 dengan realisasi fisik 100,00%

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 9 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.291.902.701,00 (95,232%) dari total anggaran Rp. 2.406.738.109,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.134.602.770,00 (88,82%) dari total anggaran Rp.151.537.981,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 867.054.000,00 (94,43%) dari total anggaran Rp. 918.238.953,00 dengan realisasi fisik 100,00%
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.495.565.860,00 (93,13%) dari total anggaran Rp.532.113.137,00 dengan realisasi fisik 100,00%
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.119.443.128,00 (97,48%) dari total anggaran Rp.122.529.327,00 dengan realisasi fisik 10,00%

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.82.522.692,00 (96,93%) dari total anggaran Rp.85.135.243,00 dengan realisasi fisik 100,00%
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu Realisasi Kinerja SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.109.880.000,00 (99,93%) dari total anggaran Rp.109.951.752,00 dengan realisasi fisik 100,00%
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.415.362.051,00 (99,37%) dari total anggaran Rp.418.009.013,00 dengan realisasi fisik 100,00%
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.19.349.000,00 (94,30%) dari total anggaran Rp.20.518.517,00 dengan realisasi fisik 100,00%
9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.48.123.200,00 (98,81%) dari total anggaran Rp.48.703.959,00 dengan realisasi fisik 100,00%

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.016.539.750,00 (97,51%) dari total anggaran Rp. 1.042.512.878,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Mebel Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.9.850.000 (98,20%) dari total anggaran Rp.10.030.616,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.2.220.000,00 (74,70%) dari total anggaran Rp.2.972.025,00 dengan realisasi fisik 100,00%
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 291.136.500,00 (95,27%)

dari total anggaran Rp.305,601.204,00 dengan realisasi fisik 100,00%

4. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 37.000.000,00 (99,82%) dari total anggaran Rp. 37.068.228,00 dengan realisasi fisik 100,00%
5. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.578.600.000,00 (98,20%) dari total anggaran Rp.585.713.700,00 dengan realisasi fisik 100,00%
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.97.733.250,00 (96,58%) dari total anggaran Rp.101.127.105,00 dengan realisasi fisik 100,00%

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.941.447,120,00 (96,58%) dari total anggaran Rp. 2.010.199.240,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.5.600.000,00 (100,00%) dari total anggaran Rp.5.600.000,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.800.005.125,00 (94,43%) dari total anggaran Rp.847.197.550,00 dengan realisasi fisik 100,00%
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.8.904.000 (86,99%) dari total anggaran Rp.10.235.088,00 dengan realisasi fisik 100,00%.
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.1.126.937.995,00 (98,24%) dari total anggaran Rp.1.147.166.602,00 dengan realisasi fisik 100,00%

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.881.321.735,00 (80,63%) dari total anggaran Rp. 2.333.657.380,00 dengan realisasi fisik 100,00%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.139.321.735,00 (92,67%) dari total anggaran Rp.150.345.000,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.91.330.000,00 (95,80%) dari total anggaran Rp.95.337.900,00 dengan realisasi fisik 100,00%
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.892.026.661 (73,52%) dari total anggaran Rp.1.213.302.927,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Sub kegiatan ini terdapat lunsuran pembayaran yang akan dilakukan di Tahun anggaran 2026 dikarenakan pada tahun 2025 sampai batas akhir tahun 2025 terdapat SPUD yang belum tertandatangani oleh BPKAD.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.59.531.000,00 (91,21%) dari total anggaran Rp.65.268.000,00 dengan realisasi fisik 100,00%
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.699.395.000 (86,41%) dari total anggaran Rp.809.403.553,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Sub kegiatan ini terdapat lunsuran pembayaran yang akan dilakukan di Tahun anggaran 2026 dikarenakan pada tahun 2025 sampai batas akhir tahun 2025 terdapat SPUD yang belum tertandatangani oleh BPKAD.

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 2.682.454.369,00 (95,39%) dari total anggaran Rp. 2.812.100.386,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.476.677.645,00 (96,07%) dari total anggaran Rp. 1.537.025.575,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.586.694.400,00 (96,68%) dari total anggaran Rp. 606.834.003,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.254.358.110,00 (97,31%) dari total anggaran Rp.261.389.475,00 dengan realisasi fisik 100,00%
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.9.091.500,00 (87,66%) dari total anggaran Rp.10.371.399,00 dengan realisasi fisik 100,00%
4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.25.764.900,00 (93,37%) dari total anggaran Rp.27.592.939,00 dengan realisasi fisik 100,00%
5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.280.903.420,00 (99,15%) dari total anggaran Rp.283.312.692,00 dengan realisasi fisik 100,00%
6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp.105.962.159,00 (95,91%) dari total anggaran Rp.110.485.499,00 dengan realisasi fisik 100,00%
7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini

sebesar Rp.213.736.656,00 (90,17%) dari total anggaran Rp.237.039.568,00 dengan realisasi fisik 100,00%

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 914.199.240,00 (94,73%) dari total anggaran Rp. 965.059.428,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 762.165.990,00 (94,48%) dari total anggaran Rp. 965.059.428,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 152.033.250,00 (96,00%) dari total anggaran Rp. 158.375.040,00 dengan realisasi fisik 100,00%

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 184.370.326,00 (97,16%) dari total anggaran Rp. 189.759.526,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 145.471.236,00 (98,58%) dari total anggaran Rp. 147.562.694,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 38.899.090,00 (92,18%) dari total anggaran Rp. 42.196.832,00 dengan realisasi fisik 100,00%

d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 107.207.158,00 (89,15%) dari total anggaran Rp. 120.255.857,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 107.207.158,00 (89,15%) dari total anggaran Rp. 120.255.857,00 dan realisasi fisik 100,00%

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 10.713.608.264,00 (98,22%) dari total anggaran Rp. 10.908.084.932,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.102.177.610,00 (98,86%) dari total anggaran Rp. 2.126.371.273,00 dengan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 206.592.856,00 (96,82%) dari total anggaran Rp. 213.377.854,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 46.760.400,00 (95,74%) dari total anggaran Rp.48.839.218,00 dengan realisasi fisik 100,00%
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 40.319.960,00 (96,00%)

dari total anggaran Rp.41.999.345,00 dengan realisasi fisik 100,00%

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 81.545.100,00 (96,79%) dari total anggaran Rp.84.251.070,00 dengan realisasi fisik 100,00%
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 844.728.215,00 (99,43%) dari total anggaran Rp.849.603.107,00 dengan realisasi fisik 100,00%
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 78.241.970,00 (97,01%) dari total anggaran Rp.80.649.473,00 dengan realisasi fisik 100,00%
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 81.851.156,00 (97,97%) dari total anggaran Rp.83.544.781,00 dengan realisasi fisik 100,00%
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 722.137.953,00 (99,73%) dari total anggaran Rp.724.106.425,00 dengan realisasi fisik 100,00%

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.644.126.215,00 (98,44%) dari total anggaran Rp. 1.670.188.334,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 583.017.444,00 (99,49%)

dari total anggaran Rp.586.033.151,00 dengan realisasi fisik 100,00%

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 36.590.304,00 (94,94%) dari total anggaran Rp.38.542.048,00 dengan realisasi fisik 100,00%
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 43.664.480,00 (96,79%) dari total anggaran Rp.45.111.229,00 dengan realisasi fisik 100,00%
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 400.118.440,00 (97,31%) dari total anggaran Rp.411.194.165,00 dengan realisasi fisik 100,00%
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 441.312.798,00 (99,11%) dari total anggaran Rp.445.260.777,00 dengan realisasi fisik 100,00%
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 41.680.045,00 (95,45%) dari total anggaran Rp.43.665.528,00 dengan realisasi fisik 100,00%
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 45.269.906,00 (97,08%) dari total anggaran Rp.46.631.075,00 dengan realisasi fisik 100,00%
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 52.472.798,00 (97,62%) dari total anggaran sebesar Rp. 53.750.361,00 dengan realisasi fisik 100,00%

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan ini terdiri dari 8 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 6.967.304.439,00 (97,97%) dari total anggaran Rp. 7.111.525.325,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.390.322.656,00 (94,14%) dari total anggaran Rp.1.476.836.379,00 dengan realisasi fisik 100,00%
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 405.331.660,00 (96,86%) dari total anggaran Rp.418.480.327,00 dengan realisasi fisik 100,00%
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 57.993.000,00 (93,32%) dari total anggaran Rp.62.147.445,00 dengan realisasi fisik 100,00%
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinegritas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfrastruktur Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.398.550.300,00 (99,85%) dari total anggaran Rp.3.403.487.901,00 dengan realisasi fisik 100,00%
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 329.409.000,00 (98,61%) dari total anggaran Rp.334.035.415,00 dengan realisasi fisik 100,00%
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 58.090.656,00 (95,36%) dari total anggaran Rp.60.917.325,00 dengan realisasi fisik 100,00%

7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 71.196.711,00 (97,54%) dari total anggaran Rp.72.989.805,00 dengan realisasi fisik 100,00%
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.256.410.456,00 (97,96%) dari total anggaran Rp.1.282.630.728,00 dengan realisasi fisik 100,00%

D. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 3.774.994.460,00 (95,73%) dari total anggaran Rp. 3.943.421.994,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut:

a. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 2.999.155.461,00 (96,47%) dari total anggaran Rp. 3.108.919.641,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.999.155.461,00 (96,47%) dari total anggaran Rp. 3.108.919.641,00 dan realisasi fisik 100,00%. Sub kegiatan ini untuk realisasi keuangan tidak tercapai secara maksimal sebesar Rp. 60.395.712,- atau 1,97%, disebabkan adanya penangguhan pembayaran SP2D yang akan diluncurkan pada tahun anggaran 2026.

b. Inovasi dan Inovasi

Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 775.838.999,00 (92,97%) dari total anggaran Rp. 834.502.354,00 dan realisasi fisik 100,00% dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Promosi dan Kampanye Inovasi Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 95.779.428,00 (85,10%) dari total anggaran Rp. 112.545.156,00 dengan realisasi fisik 100,00%.

Sub kegiatan ini untuk realisasi keuangan tidak tercapai secara maksimal sebesar Rp. 11.800.000,- atau 10,97%, disebabkan adanya penangguhan pembayaran SP2D yang akan diluncurkan pada tahun anggaran 2026.

2. Fasilitasi dan Pembinaan untuk penguatan Kerjasama Internasional Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 85.454.111,00 (85,12%) dari total anggaran Rp.100.387.267,00 dengan realisasi fisik 100,00%,
3. Fasilitasi dan Pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.029.654,00 atau (95,76%) dari total anggaran Rp.28.227.284,00 dengan realisasi fisik 100,00%.
4. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Difusi Inovasi Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 43.482.736,00 atau (95,49%) dari total anggaran Rp.45.543.410,00 dengan realisasi fisik 100,00%.
5. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 78.174.914,00 atau (87,51%) dari total anggaran Rp.89.334.255,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Sub kegiatan ini untuk realisasi keuangan tidak tercapai secara maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- atau 11,34%, disebabkan adanya penangguhan pembayaran SP2D yang akan diluncurkan pada tahun anggaran 2026.
6. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Praktik baik kepada Pelaku kepada Pelaku Inovasi dan Desiminasi Hasil Riset dan Inovasi kepda Pelaku Inovasi Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.274.740,00 atau (92,15%) dari total anggaran Rp.12.235.294,00 dengan realisasi fisik 100,00%,
7. Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi Realisasi anggaran belanja langsung pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 434.643.416,00 (97,40%) dari total anggaran Rp.446.238.688,00 dengan realisasi fisik 100,00%. Sub kegiatan ini untuk realisasi keuangan tidak tercapai secara maksimal sebesar Rp. 4.500.000,- atau 1,02%, disebabkan

adanya penangguhan pembayaran SP2D yang akan diluncurkan pada tahun anggaran 2026.

Dengan uraian pada Tahun Anggaran 2025, total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 43.745.157.835,- dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp. 42.318.796.204,00 atau sebesar 96,74% dari total anggaran yang tersedia. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 1.426.361.631,00 atau 3,26% disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian jadwal kegiatan, serta adanya kegiatan yang tidak dapat dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor secara optimal hingga akhir tahun anggaran sebesar Rp. 499.360.093 atau 1,14% yang akan dibayarkan pada luncuran anggaran tahun 2026. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, rata-rata tingkat capaian kinerja program (outcome/Indikator program) dengan realisasi 95,00%, Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 100,00%,serta rata-rata tingkat capaian kinerja sub kegiatan dengan realisasi 100,00%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Triwulan IV Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah berjalan dengan baik dan capaian kinerja serta realisasi anggaran berada dalam kategori memuaskan. Pencapaian kinerja tersebut merupakan gambaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dan tidak terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu diantisipasi sejak dini upaya upaya perbaikan dan penyesuaiannya melalui evaluasi secara berkala setiap bulannya secara intens dan konsisten.

4.2 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan;
2. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV Tahun 2025 Bappedalitbang Kabupaten Bogor disusun sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

Kode	Uraian Kegiatan Utama dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) (Output dan Outcome)	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025				Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perkiraan Perangai Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 (%)	Unit Kegiatan Daerah		
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
02	Asistensi Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan Perangai Daerah yang dihasilkan	12	Laporan	3	laporan	414.480.317	242.887.520	3	402.321.000	110,00	96,90	3	402.321.000	110,00	96,90	21,72	KATMIBD PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG INFRASTRUKTUR
03	Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan Perangai Daerah yang dihasilkan	23	Laporan	3	laporan	414.400.021	42.067.000	3	57.800.000	110,00	93,32	3	57.800.000	110,00	93,32	14,10	KATMIBD PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG INFRASTRUKTUR
04	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan Perangai Daerah yang dihasilkan	11	Laporan	3	laporan	3.423.487.311	2.295.494.100	3	3.395.550.300	110,00	99,50	3	3.395.550.300	110,00	99,50	47,1	KATMIBD PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG INFRASTRUKTUR DAN REKONSTRUKSI DAN REHABILITASI
05	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan Perangai Daerah yang dihasilkan	12	Dokumen	3	dokumen	234.026.410	211.554.200	3	326.450.000	110,00	98,81	3	326.450.000	110,00	98,81	26	KATMIBD PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG KEWILAYAHAN
06	Asistensi Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan Perangai Daerah yang dihasilkan	15	Laporan	3	laporan	80.917.230	12.497.884	3	98.000.000	110,00	95,36	3	98.000.000	110,00	95,36	2,38	KATMIBD PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG KEWILAYAHAN
07	Penyusunan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan Perangai Daerah yang dihasilkan	20	Laporan	3	laporan	72.988.010	31.332.710	3	71.192.711	110,00	87,54	3	71.192.711	110,00	87,54	2,72	KATMIBD PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG KEWILAYAHAN
08	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Subkegiatan Perangai Daerah yang dihasilkan	15	Laporan	3	laporan	1.262.532.718	1.074.940.284	3	1.256.410.800	110,00	87,96	3	1.256.410.800	110,00	87,96	26,58	KATMIBD PERENCANAAN DAN MONITORING EVALUASI BIDANG KEWILAYAHAN
09	PROGRAM INISIATIF DAN HOVAD SAGAMA	Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan	1	Rencana dan Pelaksanaan	7	Rencana dan Pelaksanaan	3.443.521.994	3.442.843.320	7	3.774.994.480	110,00	98,73	7	3.774.994.480	110,00	98,73	16,58	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Dua aktifitas Utama Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Indikator Utama (KIP)	Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2020				Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2021				Realisasi Kinerja pada Triwulan IV				Rendahnya Capaian Kinerja dan Nilai Peringkat Daerah Kabupaten yang diukur	Tingkat Capaian Kinerja dan Rendahnya Anggaran Realisasi Anggaran	Rendahnya Kinerja dan Anggaran Berbasis Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Teknologi (M&I) Tahun 2020 dan 2021	Rendahnya Kinerja dan Anggaran Berbasis Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Teknologi (M&I) Tahun 2020 dan 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Rendahnya Anggaran Realisasi Anggaran	Rendahnya Kinerja dan Anggaran Berbasis Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Teknologi (M&I) Tahun 2020 dan 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Rendahnya Anggaran Realisasi Anggaran
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
011	Fasilitas dan Pembinaan untuk Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas dan Pembinaan untuk Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	12.235.234	0	4.268.880	2	11.274.740	100,00	82,18	0	2	1	214.240	0,06					
012	Fasilitas dan Pembinaan untuk Asesmen Kinerja Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitas dan Pembinaan untuk Asesmen Kinerja Inovasi	0	Laporan	2.244.285.216,00	0	421.070.250	1	434.843.410	100,00	17,40	0	1	0	434.843.410	13,40					
01	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan Publik	M&I APD Perangkat Daerah	00	Perbaikan	20.081.050.533	0	8.308.318.020	0	20.142.728.111	100,00	36,42	0	0	0	20.142.728.111	1,32	BERKURANG				
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja yang Berbasis M&I	100	perencanaan	491.838.882	20	173.703.364	11,0	444.424.980	100,00	35,23	100	100	100	444.424.980	7,18	MATRIK PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BERBASIS M&I				
01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40	Dokumen	2.483.125.491	0	6.578.104	0	157.696.704	100,00	26,42	0	0	0	157.696.704	0,33					
02	Koordinasi dan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen M&I S&PD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Kinerja S&PD	0	Dokumen	263.922.006	0	21.111.201	1	21.111.201	100,00	92	0	0	0	21.111.201	7,54					
03	Koordinasi dan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perbaikan M&I S&PD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Kinerja S&PD	0	Dokumen	94.188.241	0	6.382.244	1	13.578.742	100,00	68	0	0	0	13.578.742	7,37					
04	Koordinasi dan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA S&PD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Kinerja S&PD	0	Dokumen	240.960.208	0	14.303.400	1	14.303.400	100,00	60	0	0	0	14.303.400	0					
05	Koordinasi dan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perbaikan DPA S&PD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Kinerja S&PD	0	Dokumen	263.948.247	0	7.385.430	1	12.699.200	100,00	28	0	0	0	12.699.200	0					
06	Koordinasi dan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi M&I S&PD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Evaluasi Kinerja S&PD	25	Dokumen	1.071.008.070	0	3.871.225	0	21.125.885	100,00	30	0	0	0	21.125.885	1,37					
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	Laporan	201.360.017	0	114.902.280	0	108.620.040	100,00	58,53	0	0	0	108.620.040	20					
08	Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Sektor Publik	0	Laporan	78.085.280	0	7.382.640	1	7.382.640	100,00	91,87	0	0	0	7.382.640	1.582.940					

Kode	Uraian/Indikator Utama Pencapaian Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Mendasar (PA)	Target Rencana Pengabdian Masyarakat tahun 2023			Realisasi Kinerja Daerah Pengabdian Masyarakat tahun 2023			Realisasi Kinerja Pusat Tahunan			Target Capaian Rincin dan Realisasi Anggaran Rencana 1 Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Pengabdian Masyarakat tahun 2023			Target Capaian Rincin dan Realisasi Anggaran Pengabdian Masyarakat tahun 2023 (%)							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
5	01	2.02	Administrasi Keuangan Pengabdian Masyarakat	1.00	perman	11.231.862.820	20	4.487.072.281	110	perman	17.881.728.263	10,00	90,57	17.081.756.803	981	17.081.756.803	100,00	13,31	17.081.756.803	100,00	13,31	17.081.756.803	100,00	13,31	KACIM RIJAU UM
			01) Penyediaan dan Tunjangan ASN	78	bulan	17.052.178.510	3	4.264.082.582	14	keangpdaan	18.538.953.033	10,00	88,74	18.831.953.033	51	18.831.953.033	100,00	20	18.831.953.033	100,00	20	18.831.953.033	100,00	20	
			02) Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran/Manajemen Keuangan SIPD	08	Dokumen	261.919.041	3	103.358.580	12	Dokumen	122.528.218	91,00	94,58	120.702.880	1	120.702.880	100,00	20	120.702.880	100,00	20	120.702.880	100,00	20	
			03) Kualitas dan Pelaksanaan Anggaran SIPD	5	Dokumen	178.178.800,26	1	1.758.228	1	Dokumen	11.556.412	91,00	80,20	14.072.880	1	14.072.880	100,00	20	14.072.880	100,00	20	14.072.880	100,00	20	
			04) Efektivitas dan Pertepatan Laporan Keuangan APBD Tahun SIPD	5	Laporan	155.884.910	1	3.102.480	1	Laporan	35.128.218	91,00	80,20	14.352.280	1	14.352.280	100,00	20	14.352.280	100,00	20	14.352.280	100,00	20	
			05) Kualitas Pelaksanaan/Manajemen SIPD	18	Laporan	960.181.060,26	1	24.811.430	2	Laporan	32.881.718	91,00	86,51	88.000.000	2	88.000.000	100,00	20	88.000.000	100,00	20	88.000.000	100,00	20	
5	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah jika Pengabdian Masyarakat	1.00	perman	303.134.878	20	18.106.716	100	perman	42.132.322	91,00	82,88	29.884.481	101	29.884.481	100,00	20	29.884.481	100,00	20	29.884.481	100,00	20	KACIM UMPEG
			01) Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SIPD	10	Dokumen	188.798.720	1	8.254.300	2	Dokumen	12.766.148	91,00	88,38	11.207.880	2	11.207.880	100,00	20	11.207.880	100,00	20	11.207.880	100,00	20	
			02) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah jika SIPD	5	Laporan	88.091.020	1	3.519.750	1	Laporan	8.762.811	91,00	92,85	8.579.280	1	8.579.280	100,00	20	8.579.280	100,00	20	8.579.280	100,00	20	
			03) Pelaksanaan Barang Milik Daerah jika SIPD	38	Laporan	118.767.221	2	848.086	4	Laporan	17.802.517	91,00	88,91	11.472.281	4	11.472.281	100,00	20	11.472.281	100,00	20	11.472.281	100,00	20	
5	01	2.04	Administrasi Pengabdian Masyarakat	1.00	perman	4.324.822.402	20	191.428.488	100	perman	42.608.941	91,00	90,52	461.002.879	101	461.002.879	100,00	20	461.002.879	100,00	20	461.002.879	100,00	20	KACIM UMPEG
			01) Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran/Manajemen Keuangan SIPD	18	Dokumen	188.016.880	4	3.270.380	12	Dokumen	17.288.818	91,00	88,51	15.275.280	12	15.275.280	100,00	20	15.275.280	100,00	20	15.275.280	100,00	20	
			02) Melatih, Bina, dan Perbaikan Keang Masyarak	69	Dokumen	658.849.504	4	11.286.000	12	Dokumen	28.529.312	91,00	84,06	28.041.280	2	28.041.280	100,00	20	28.041.280	100,00	20	28.041.280	100,00	20	

Kode	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)	Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)				Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)	Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)	Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)	Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)	Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)	Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)
			2021	2022	2023	2024						
06	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Adanya kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
010	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Adanya kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
011	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Adanya kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
REKAPITULASI Jumlah Kegiatan : 4 Jumlah Kegiatan : 17 Jumlah Sub Kegiatan : 63												

Kode	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)	Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)				Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)	Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)	Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)	Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)	Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)	Target Kinerja Utama (IKU) yang Relevan (Output) (Sesuai RTRW)
			2021	2022	2023	2024						
REKAPITULASI Jumlah Kegiatan : 4 Jumlah Kegiatan : 17 Jumlah Sub Kegiatan : 63												

Cibinong, Januari 2026
Dituan



M. S. A.
M. S. A.

001 1 005